

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi

Afli Audryna, Haryono, Juanda Astarani, Rusliyawati, Nella Yantiana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

afliaudryachan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Balancing Funds on Regional Expenditure, with Budget Ratcheting as a moderating variable. The research was conducted on the Provincial Government of West Kalimantan for the period 2021–2023 using a quantitative approach and multiple linear regression analysis. The results showed that only Balancing Funds had a significant and positive effect on Regional Expenditure, indicating the strong dependence of regional financing on central government transfers. Meanwhile, PAD had no significant effect, suggesting limited fiscal independence in the province. Furthermore, the Budget Ratcheting variables (X1_Z and X2_Z) did not significantly moderate the relationship between PAD and Balancing Funds with Regional Expenditure. These findings highlight the need for improved local revenue management and more performance-based budgeting to reduce dependency and inefficiency in fiscal policy.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Balancing Funds, Regional Expenditure, Budget Ratcheting, Fiscal Autonomy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, dengan *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat periode 2021–2023 dengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Dana Perimbangan yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah, yang mengindikasikan ketergantungan pendanaan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara itu, PAD tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih terbatas. Selain itu, variabel *Budget Ratcheting* (X1_Z dan X2_Z) tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan pengelolaan PAD dan penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Budget Ratcheting, Kemandirian Fiskal*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Pemberlakuan Desentralisasi Fiskal merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah terutama untuk membiayai berbagai kebutuhan Pembangunan dan pelayanan publik. Adapun sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang menentukan kapasitas fiskal daerah dalam mengalokasikan belanjanya.

Pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah didasari akan dua hal. Pertama, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, dan mampu mengelola keuangan tersebut untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Kedua, pemerintah daerah mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat agar Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber atas keuangan (Andrean & Sari, 2020). Sementara itu, Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dituntut untuk dapat meningkatkan dalam kualitas pelayanan publik, dan dialokasikan untuk hal produktif lainnya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat didaerah tersebut (Andrean & Sari, 2020)

Dalam praktiknya, proses penyusunan anggaran dipengaruhi oleh fenomena *Budget Ratcheting*. *Budget ratcheting* adalah konsep yang mengacu pada kecenderungan organisasi untuk mengurangi anggaran saat terjadi pemangkasan dana, namun tidak meningkatnya secara proporsional saat dana tersedia lebih banyak (Kurniawan & Kusumastuti, 2024). Fenomena ini erat kaitannya dengan *agency theory*, di mana terdapat potensi konflik kepentingan antara pembuat kebijakan (*agent*) dan publik sebagai penerima manfaat (*principal*). Adanya *asymmetric information* menyebabkan penyusunan anggaran dapat mengalami distorsi, misalnya dengan menggelembungkan alokasi belanja atau mengecilkan target pendapatan agar lebih mudah terealisasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki catatan prestasi yang cukup baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada sisi pendapatan daerah 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 10,4% dan belanja meningkat sebesar 19,1%. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang semula Rp. 2.507.322.119.826,13., pada tahun 2021 menjadi Rp. 3.222.528.989.836,40 di tahun 2023. Dalam aspek realisasi Pendapatan menunjukkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 98,58% di tahun 2023. Kemudian disisi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 94,68% dari anggaran ditahun 2023.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andrean & Sari, 2020),(Luh et al., 2023) menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Namun, bagaimana *budget ratcheting* memoderasi hubungan ini masih menjadi perdebatan. Beberapa studi mengindikasikan bahwa *budget ratcheting* dapat memperkuat efek PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja daerah (Luh et al., 2023) sementara studi lain yang dilakukan oleh (Kurniawan &

Kusumastuti, 2024) menemukan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan memperlemah hubungan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana PAD dan Dana Perimbangan memengaruhi Belanja Daerah, serta bagaimana *budget ratcheting* berperan dalam memoderasi hubungan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan anggaran daerah yang lebih efisien dan akuntabel.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber lokal, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat (Luh et al., 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai belanja pembangunan dan pelayanan publik (Rahmawati, 2010; Hamdani et al., 2015). Hal ini menunjukkan adanya hubungan linier antara kapasitas fiskal dan alokasi belanja daerah.

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah. Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penelitian (Silviani & Adiputra, 2023) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yang merupakan komponen penting dalam penguatan infrastruktur dan pelayanan jangka panjang. Hasil ini sejalan dengan penelitian lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Malau et al., 2020), yang menemukan bahwa besarnya Dana Perimbangan pusat akan berdampak langsung pada alokasi belanja produktif pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Belanja adalah Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, belanja daerah

diharapkan digunakan secara efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.(BPK, 2010)

Pengalokasian belanja daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan PAD dan dana perimbangan. Semakin besar penerimaan, maka semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah dalam merancang dan merealisasikan belanja yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andrean & Sari, 2020) yang menyatakan bahwa Semakin tinggi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD maka akan semakin tinggi pula belanja daerah.

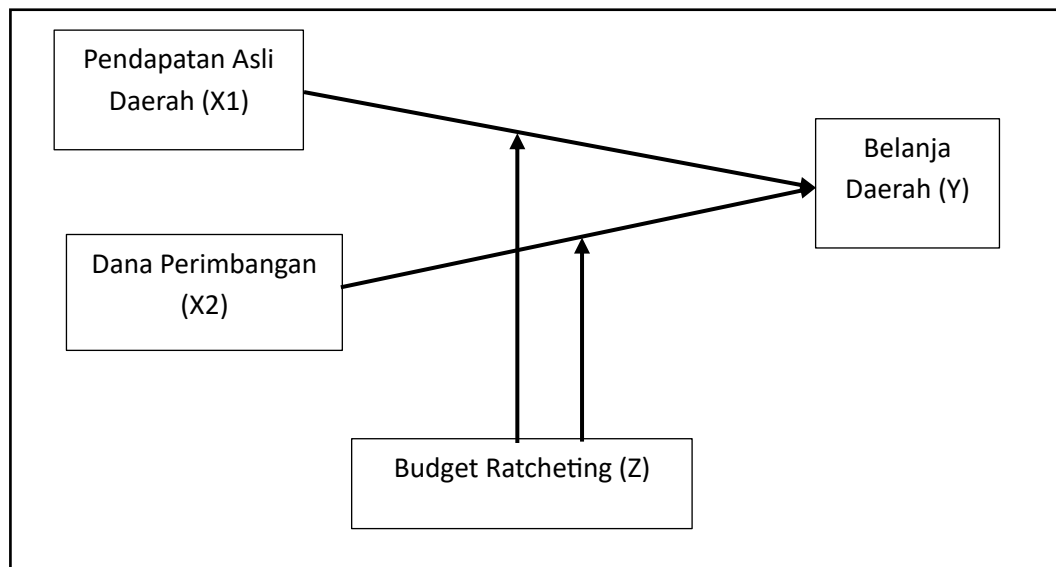
Budget Ratcheting

Budget Ratcheting adalah fenomena dalam penganggaran publik di mana pemerintah cenderung menggunakan capaian atau realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Weitzman (1980) menyebutkan bahwa praktik ini dapat menimbulkan bias dalam alokasi anggaran, karena cenderung mempertahankan atau menaikkan anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil atau efisiensi.

Dalam konteks teori keagenan, *budget ratcheting* muncul akibat asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif, serta antara pemerintah dan masyarakat (Abdullah & Junita, 2016). Beberapa penelitian seperti (Andrean & Sari, 2020) dan (Luh et al., 2023) menemukan bahwa *budget ratcheting* dapat memoderasi hubungan antara PAD dan belanja daerah, serta antara dana perimbangan dan belanja daerah. Efek moderasi ini dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan, tergantung konteks politik, kapasitas fiskal, dan tata kelola anggaran masing-masing daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan jenis penelitian Kausalitas. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kausatif adalah penelitian atau studi yang dilakukan untuk membuktikan penyebab dari suatu permasalahan dan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini terdiri atas dua variabel independen (X), yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, kemudian variabel dependen (Y), yaitu Belanja Daerah serta variabel moderasi (Z), yaitu *budget ratcheting*. Berdasarkan penjelasan permasalahan penelitian, kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan maka dapat disusun kerangka berpikir penelitian dengan model sebagai berikut:



Teknik Analisis Data dilakukan menggunakan SPSS 25 untuk menguji hubungan antar variabel dan mengidentifikasi pengaruh langsung maupun tidak langsung. Adapun data diperoleh melalui data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021-2023.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Penelitian sebelumnya oleh (Andrean & Sari,2020) dan (Kurniawan & Kusumastuti, 2024) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan Pembangunan.

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang termasuk Dana Perimbangan merupakan sumber utama belanja daerah selain PAD. Penelitian yang dilakukan oleh (Luh et al., 2023) menunjukkan bahwa pendapatan transfer juga memberikan pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja, termasuk belanja modal.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh *Budget Ratcheting* Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Daerah

Menurut Andrean & Sari (2020) serta Riana et al. (2024), *budget ratcheting* cenderung muncul karena adanya asimetri informasi dan kecenderungan agen untuk menggunakan data historis (realisasi atau target tahun sebelumnya) dalam menentukan target anggaran baru. Hal ini bisa memperkuat hubungan PAD terhadap

belanja, karena setiap peningkatan PAD dijadikan justifikasi untuk meningkatkan belanja, bahkan secara tidak proporsional

H3: *Budget Ratcheting* memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh *Budget Ratcheting* Terhadap Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan Belanja Daerah

Menurut Silviani & Adiputra (2023), dana perimbangan yang terus meningkat sering kali digunakan sebagai justifikasi untuk peningkatan belanja. Dalam konteks ini, *budget ratcheting* akan memperkuat hubungan tersebut karena kebiasaan pemerintah daerah dalam menambah alokasi belanja berdasarkan pola Dana Perimbangan tahun sebelumnya, tanpa pertimbangan efisiensi

H4: *Budget Ratcheting* memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai informasi umum mengenai data penelitian berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi masing-masing data. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	42	34406.00	786571.00	293161.4524	212298.6776
DANA TF	42	675488.00	2383536.00	1260691.595	431541.7696
BELANJA DAERAH	42	761062.00	2133189.00	1342537.500	373047.9700
BUDGET RATCHETING	42	-507904.00	416909.00	20163.2857	122322.4941
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai rata-rata untuk PAD adalah sebesar 293161.4524, Dana Perimbangan sebesar 1260691.595, Belanja Daerah sebesar 1342537.500 dan *Budget Ratcheting* sebesar 20163.2857

Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	192798.8945
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.096
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25.

Hasil dari tabel di atas memperlihatkan hasil atas Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.174 yang artinya > 0,05, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan tingkat signifikansi atas variabel penelitian ini berdistribusi secara normal. Dengan demikian, residual data berdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Regresi Persamaan 1
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	395066.104	108964.591		3.626	.001		
	PAD	.051	.154	.029	.329	.744	.917	1.090
	DANA TF	.735	.073	.850	10.131	.000	.998	1.002
	BUDGET RATCHETING	.290	.267	.095	1.086	.284	.919	1.088

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25.

Berdasarkan Tabel 3 Dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,090 dengan *Tolerance* sebesar 0,917, Dana Perimbangan VIF sebesar 1,002 dan *Tolerance* 0,998 dan nilai VIF *Budget Ratcheting* sebesar 1,088 dengan *Tolerance* sebesar 0,919. Semua variabel memenuhi syarat bebas multikolinieritas yaitu nilai *Tolerance* (> 0,1) dan nilai VIF (< 10). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	69013.098	58289.177		1.184	.244
	PAD	.144	.082	.273	1.755	.087
	DANA TF	.029	.039	.114	.760	.452
	BUDGET RATCHETING	.320	.143	.349	2.240	.031

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25.

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan *Budget Ratching* mempunyai nilai Sig. (> 0,05) artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.856 ^a	.733	.712	200264.8222	.682

a. Predictors: (Constant), BUDGET RATCHETING, DANA TF, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.909 ^a	.826	.812	161609448961.46080	1.078
a. Predictors: (Constant), BR, DANA TF, PAD					
b. Dependent Variable: BELANJA					

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25.

Diket : (CEK RUMUS DW)

$$d =$$

$$dU = 1.8451$$

$$4-Du = 4 - 1.8451 = 2.1549$$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) adalah sebesar 1.078 yang berarti berada diantara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu dan model regresi untuk penelitian ini dapat diterima.

Analisis Regresi

Analisis regresi dengan variabel moderasi merupakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model hubungannya. Variabel moderasi berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model persamaan atas pengujian analisis regresi moderasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD = a + b_1PAD + b_2DP + e \quad \text{Persamaan I}$$

$$BD = a + b_1PAD + b_2DP + b_3BR + b_4PAD \times BR + b_5DP \times BR + e \quad \text{Persamaan II}$$

BD sebagai Belanja Daerah ditunjuk sebagai variabel Dependen, PAD dan Dana Perimbangan ditunjuk sebagai variabel independen lalu BR sebagai *Budget Ratcheting* ditunjuk sebagai variabel moderasi.

Tabel 6. Hasil Estimasi Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	413810.747	107838.459		3.837	.000
	PAD	.003	.148	.002	.022	.983
	DANA TF	.736	.073	.851	10.119	.000

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25

Berdasarkan tabel di atas nilai koefisien konstanta adalah 413810.747 dan nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.003 yang menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai positif sebesar 0.003 terhadap Belanja Daerah dan Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.736 yang artinya semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan maka akan semakin meningkat Belanja Daerah pada Pemerintahan Daerah.

Tabel 7. Hasil Estimasi Moderating Regression Analysis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	357455.729	109545.154		3.263	.002
	PAD	.084	.153	.048	.546	.588
	DANA TF	.770	.075	.891	10.335	.000
	X1_Z	1.629E-6	.000	.288	1.741	.090
	X2_Z	-3.241E-7	.000	-.169	-1.041	.305

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25

Dari hasil tabel di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 357455.729, dan nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif sebesar 0,084 terhadap Belanja Daerah, dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif sebesar 0.770 artinya semakin meningkat PAD dan Dana Perimbangan maka akan meningkatkan juga terhadap Belanja Daerah. Sedangkan jika ditambahkan budget *ratcheting* sebagai variabel moderasi maka akan menghasilkan nilai koefisien 1.629 dan - 3.241 terhadap Belanja Daerah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.851 ^a	.725	.710	200727.3233

a. Predictors: (Constant), DANA TF, PAD

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25

Diketahui nilai R-Square sebesar 0.725 maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana TF terhadap Belanja Daerah sebesar 72.5% sedangkan sisanya sebesar 27.5% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Budget Ratcheting, PAD X BR dan DP X BR terhadap Belanja Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.866 ^a	.750	.723	196482.5157

a. Predictors: (Constant), X2_Z, DANA TF, PAD, X1_Z

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25

Diketahui nilai R-Square mengalami peningkatan sebesar 0.750 maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana TF terhadap Belanja Daerah sebesar 75% sedangkan sisanya sebesar 25% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya. *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi memperkuat dalam memoderasi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.

Uji F

Tabel 10. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4277357282787.6	4	1069339320696.91	27.699	.000 ^b
	Residual	1428399022752.9	37	38605378993.321		
	Total	5705756305540.5	41			

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

b. Predictors: (Constant), X2_Z, DANA TF, PAD, X1_Z

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25

Berdasarkan hasil uji ANOVA yang ditampilkan pada Tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 27,699 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini berada jauh di bawah batas signifikansi 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah signifikan secara simultan. Artinya, secara bersama-sama, variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DANA TF), dan variabel moderasi *budget ratcheting* (X1_Z dan X2_Z) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Dengan kata lain, model regresi ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.

Uji T

Tabel 11. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	357455.729	109545.154		3.263	.002
	PAD	.084	.153	.048	.546	.588
	DANA TF	.770	.075	.891	10.335	.000
	X1_Z	1.629E-6	.000	.288	1.741	.090
	X2_Z	-3.241E-7	.000	-.169	-1.041	.305

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS ver 25

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Daerah. Berdasarkan Tabel *Coefficients*, berikut adalah interpretasi masing-masing variabel:

1. Nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,546 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,588, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial. Dengan demikian, kontribusi PAD terhadap

- pembiayaan belanja daerah di Kalimantan Barat masih belum optimal dan belum menjadi penentu utama dalam alokasi anggaran belanja.
2. Nilai t hitung Dana Perimbangan sebesar 10,335 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang jauh di bawah 0,05. Ini berarti bahwa Dana Transfer berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dengan koefisien Beta sebesar 0,891, Dana Transfer menjadi variabel dengan pengaruh paling kuat, yang menandakan bahwa belanja daerah sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.
 3. Nilai t hitung $X1_Z$ (PAD dimoderasi *Budget Ratcheting*) sebesar 1,741 dan nilai signifikansi sebesar 0,090. Meskipun nilainya masih di atas batas 0,05, angka ini mendekati signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa $X1_Z$ belum berpengaruh signifikan, namun ada indikasi kecenderungan bahwa realisasi belanja tahun sebelumnya sedikit banyak dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran berikutnya.
 4. Nilai t hitung $X2_Z$ (Dana Perimbangan dimoderasi *Budget Ratcheting*) sebesar -1,041 dan nilai signifikansi sebesar 0,305, yang menunjukkan bahwa $X2_Z$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Bahkan koefisiennya yang negatif mengindikasikan bahwa pengaruh realisasi anggaran dua tahun sebelumnya cenderung melemahkan besaran belanja daerah saat ini, meskipun tidak signifikan secara statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan tingkat sig yang diperoleh sebesar $0,558 > 0,005$, maka dapat dimaknai bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Andrean & Sari, 2020) yang hasil Uji statistik menunjukkan PAD memiliki pengaruh sebesar 0,532 dengan arah positif terhadap Belanja Daerah, yang artinya ketika PAD mengalami peningkatan, maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh Kontribusi PAD yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam Struktur APBD. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan yang menjadi poin penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. PAD juga menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerahnya sendiri tanpa harus tergantung kepada Pemerintah Pusat.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan Tingkat sig yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,005$, maka dapat dimaknai bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Koefisien sebesar 0.770

menunjukkan bahwa setiap peningkatan Dana Perimbangan sebesar 1 unit akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.770. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mbuinga et al., 2022),(Pane et al., 2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Dimoderasi oleh *Budget Ratcheting* terhadap Belanja Daerah

Dalam penelitian ini, variabel $X1_Z$ dan $X2_Z$ merupakan representasi dari mekanisme *budget ratcheting*, yaitu kecenderungan pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan anggaran belanja berdasarkan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan efisiensi atau kebutuhan aktual. Fenomena ini lazim terjadi dalam sistem penganggaran publik yang kurang berbasis kinerja, dan biasanya mencerminkan perilaku birokratis yang ingin mengamankan sumber daya di masa mendatang.

Berdasarkan hasil uji regresi, variabel $X1_Z$ memiliki nilai koefisien sebesar $1.629E-6$ dengan nilai signifikansi 0,090, sedangkan $X2_Z$ memiliki nilai koefisien sebesar $-3.241E-7$ dengan nilai signifikansi 0,305. Nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut berada di atas taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$), yang menunjukkan bahwa secara statistik, $X1_Z$ dan $X2_Z$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat dalam periode yang diamati.

Meski demikian, $X1_Z$ menunjukkan arah pengaruh positif dan memiliki signifikansi mendekati batas (0,090), yang mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan *budget ratcheting* meskipun belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Artinya, ada indikasi bahwa pemerintah daerah mungkin mempertimbangkan realisasi belanja sebelumnya sebagai dasar penentuan anggaran baru, namun pengaruh tersebut belum cukup konsisten atau dominan dalam memengaruhi kebijakan belanja secara menyeluruh.

Sementara itu, variabel $X2_Z$ justru menunjukkan koefisien negatif dengan nilai signifikansi yang jauh dari signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pola pertambahan atau pengurangan anggaran belanja berdasarkan realisasi dua tahun sebelumnya, bahkan cenderung menunjukkan arah penurunan. Dengan kata lain, $X2_Z$ tidak mencerminkan praktik *ratcheting* yang kuat dan stabil dalam penganggaran belanja daerah di Kalimantan Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan indikator *budget ratcheting* ($X1_Z$ dan $X2_Z$) terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Dana Perimbangan yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000,

yang berada jauh di bawah batas signifikansi 0,05, serta nilai koefisien beta tertinggi yaitu 0,891. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur pembiayaan belanja daerah di Kalimantan Barat masih sangat bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Sementara itu, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,588, yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Meskipun PAD merupakan sumber pendapatan yang idealnya mencerminkan kemandirian fiskal daerah, dalam konteks Kalimantan Barat, kontribusinya terhadap pembiayaan belanja daerah masih belum optimal.

Selanjutnya, variabel X1_Z yang merepresentasikan praktik *budget ratcheting* jangka pendek memiliki nilai signifikansi 0,090. Meskipun belum signifikan secara statistik pada taraf 5%, nilainya yang mendekati batas signifikansi mengindikasikan adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mempertahankan atau menyesuaikan anggaran belanja berdasarkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Namun, kecenderungan ini belum cukup kuat untuk dikatakan sebagai pola umum dalam penganggaran.

Adapun variabel X2_Z yang mewakili pengaruh realisasi anggaran dua tahun sebelumnya terhadap belanja saat ini, menunjukkan nilai signifikansi 0,305 dengan koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pola belanja berulang yang konsisten dalam jangka panjang, sehingga *budget ratcheting* tidak terbukti secara signifikan memengaruhi belanja daerah dalam jangka waktu dua tahun ke belakang.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa belanja daerah di Kalimantan Barat lebih ditentukan oleh faktor eksternal berupa Dana Perimbangan dari pusat, daripada oleh kemampuan pendapatan asli daerah atau pola pengulangan belanja tahun-tahun sebelumnya.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas disarankan agar pemerintah daerah Kalimantan Barat berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan cara mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan efisiensi pemungutan pajak daerah, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan usaha-usaha daerah yang produktif.

Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran, agar lebih berbasis pada kebutuhan aktual dan pencapaian kinerja program, bukan hanya mengikuti pola anggaran sebelumnya yang bersifat rutin atau administratif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik *budget ratcheting* yang tidak efisien dan dapat mengarah pada pemborosan anggaran.

Pemerintah daerah juga disarankan untuk memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan di bidang penganggaran, termasuk dengan menerapkan sistem

pengawasan internal yang ketat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Terakhir, untuk memperkaya hasil penelitian, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambah variabel-variabel lain, seperti aspek politik anggaran, efektivitas kinerja program, atau kondisi ekonomi makro daerah. Penelitian juga dapat diperluas ke wilayah lain untuk mengetahui apakah pola ketergantungan pada Dana Perimbangan dan lemahnya pengaruh *budget ratcheting* juga terjadi secara nasional atau hanya bersifat regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Junita, A. (2016). Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Modus*, 28(2), 185. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.850>
- Andrean, A., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 1984–2000. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.191>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kurniawan, R., & Kusumastuti, R. (2024). Efek Budget Ratcheting Pada Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1, 126–142.
- Luh, N., Silviani, P. D., Made, I., & Adiputra, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Bali). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 152–163.
- Malau, E. I., Calen, C., Siregar, V. M. M., & Saragih, K. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner*, 4(1), 356–361. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.168>
- Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203–3213.
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika*

